

**PENERAPAN HUKUM TINDAK PIDANA KORUPSI BERUPA
PENCABUTAN HAK POLITIK BERDASARKAN UNDANG-
UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG
PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI
(STUDI KASUS PUTUSAN MA NOMOR 532K/PID.SUS/2016)**



**Di Ajukan Untuk Melengkapi Tugas Akhir Memenuhi Syarat Mencapai
Gelar Sarjana Hukum**

Oleh

NAMA : EMI MULYANINGSIH

NPM : 201210115043

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA**

2018

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Penerapan Hukum Tindak Pidana Korupsi Berupa
Pencabutan Hak Politik Berdasarkan Undang-
Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Studi
Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor :
532K/PID.SUS/2016)

Nama Mahasiswa : Emi Mulyaningsih

Nomor Pokok Mahasiswa : 201210115043

Program Studi / Fakultas : Ilmu Hukum / Hukum

MENYETUJUI,

Dekan,

Dr.Ir.H. Erwin Owan Hermansyah Soetoto, SE.,SH.,MH.,MM

NIP 010803017

Pembimbing I

Pembimbing II



Herybertus Soekartono, SH,MH
NIP 019909008



Lukman Hakim, S.H.,M.H
NIP 010803027

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

Judul Skripsi : Penerapan Hukum Tindak Pidana Korupsi Berupa
Pencabutan Hak Politik Berdasarkan Undang-
Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Studi
Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor :
532K/PID.SUS/2016)

Nama Mahasiswa : Emi Mulyaningsih

Nomor Pokok Mahasiswa : 201210115043

Program Studi / Fakultas : Ilmu Hukum / Hukum



LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : Penerapan Hukum Tindak Pidana Korupsi Berupa
Pencabutan Hak Politik Berdasarkan Undang-
Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Studi
Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor :
532K/PID.SUS/2016)

Nama Mahasiswa : Emi Mulyaningsih

Nomor Pokok Mahasiswa : 201210115043

Program Studi / Fakultas : Ilmu Hukum / Hukum

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 6 Juli 2018

Bekasi, 24 Juli 2018

MENGESAHKAN,

Ketua Tim Penguji : Herybertus Soekartono, S.H.,M.H.,

NIP 019909008

Penguji I : Octo Iskandar, S.H.,M.H.,

NIP 011603044

Penguji II : Lukman Hakim, S.H.,M.H.,

NIP 010803027

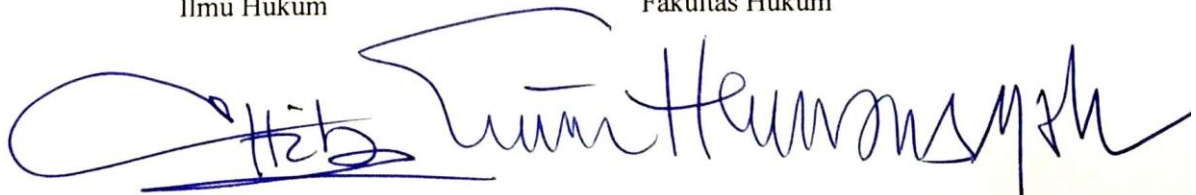
MENGETAHUI,

Ketua Program Studi

Dekan

Ilmu Hukum

Fakultas Hukum



Elfirda Ade Putri, S.H., M.H., Dr. Ir. H. Erwin Owan Hermansyah Soetoto SH, MH

NIP 011512043

NIP 01804338

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

Skripsi yang berjudul

PENERAPAN HUKUM TINDAK PIDANA KORUPSI BERUPA
PENCABUTAN HAK POLITIK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK
PIDANA KORUPSI (STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG
NOMOR 532K/PID.SUS/2016)

Ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis oleh orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya telah dituliskan secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Apabila dikemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam karya ini, saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai peraturan yang berlaku.

Saya mengizinkan skripsi ini dipinjam dan digunakan melalui perpustakaan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Saya memberikan izin kepada Perpustakaan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya untuk menyimpan skripsi ini dalam bentuk digital dan mempublikasikannya melalui internet selama publikasi tersebut melalui portal Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Bekasi, 26 Juni 2018

Yang membuat pernyataan



Official stamp of Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. The stamp is rectangular with a green border. Inside, it says 'METRAI TEMPEL' at the top, followed by a unique code '4F2E0A811811001'. Below that is the number '6000' in large red digits, and 'ENAM RIBU RUPIAH' in smaller text. At the bottom, the name 'Emi Mulyaningsih' is printed. A blue ink signature is written over the stamp.

201210115043

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Nama : Emi Mulyaningsih
NPM : 201210115043
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non Exclusif Free Right*), atas karya ilmiah Saya yang berjudul

**PENERAPAN HUKUM TINDAK PIDANA KORUPSI BERUPA
PENCABUTAN HAK POLITIK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK
PIDANA KORUPSI (STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG
NOMOR 532K/PID.SUS/2016)**

Beserta perangkat yang ada (bila diperlukan). Dengan hak bebas royalti non-eksekutif ini, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berhak menyimpan, mengalihkan media/ formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya dan menampilkan/ mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis / pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggung jawab saya pribadi

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya

Bekasi, 26 Juni 2018

Yang Menandatangani


METABOLISME
TERMINAL
66EC3A5F-58713002
6000
ENAM RIBU RUPIAH
Emi Mulyaningsih

ABSTRAK

Emi Mulyaningsih, 201210115043, Penerapan Hukum Tindak Pidana Korupsi Berupa Pencabutan Hak Politik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 532k/Pid.Sus/2016)

Kata Kunci : Penerapan Hukum, Tindak Pidana Korupsi

Bahwa di dalam penerapan hukuman tambahan yaitu pencabutan hak politik bagi para pelaku tindak pidana korupsi agar diperlakukan sama bagi siapa yang melanggar, supaya memberikan efek jera terhadap pelaku. Karena korupsi sangat merugikan keuangan negara. Dari kacamata ilmu hukum berkenaan dengan pembelajaran dan ada banyak pandangan, Hukum adalah sebuah produk yang sudah ada dan langsung dapat digunakan seperti seseorang menggunakan benda fisik langsung pakai. Kaum *legisme* misalnya berpandangan demikian, mereka menyamakan hukum sama dengan Undang-Undang. Diluar Undang-Undang tidak ada hukum dan Undang-Undang di ibaratkan dengan benda fisik yang langsung pakai melalui penerapan pasal Undang-Undang. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan Yuridis Normatif, yaitu dengan mengkaji peraturan perundang-undangan, teori-teori hukum dan yurisprudensi yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas. Data yang dipergunakan adalah data sekunder, yaitu : data yang mendukung keterangan atau menunjang kelengkapan data primer yang diperoleh dari perpustakaan dan koleksi pustaka pribadi penulis. Analisis data yang digunakan analisis normatif, yaitu data yang terkumpul dituangkan dalam bentuk uraian logis dan sistematis, selanjutnya di analisis untuk memperoleh kejelasan penyelesaian masalah, kemudian ditarik kesimpulan secara jelas yaitu, dari hal bersifat umum menuju hal bersifat khusus. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara nomor 532K/PID.SUS/2016 telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dan apakah putusan telah mencerminkan rasa keadilan serta kepastian hukum.

Pembimbing :

Herybertus Soekartono, S.H.,M.H

Lukman Hakim, S.H.,M.H

ABSTRACT

Emi Mulyaningsih, 201210115043, *Application of Law of Corruption in the form of Revocation of Political Rights Based on Law Number 20 Year 2001 Concerning the Eradication of Corruption Crime (Case Study of Supreme Court Decision Number 532k / Pid.Sus / 2016)*

Keywords: *Law Implementation, Corruption Crime*

Whereas in the application of the additional punishment is the revocation of political rights for the perpetrators of corruption to be treated equally for those who violate, in order to provide a deterrent effect on the perpetrators. Because corruption is very detrimental to state finances. From the perspective of legal science with regard to learning and there are many views, Law is a product that already exists and can be directly used as a person using physical objects directly wear. Legisms for example like that, they equate the law with the Law. Outside the law there is no law and the law in the sense of physical objects that directly use through the application of the article of the Act. This research uses Normative Juridical approach method, that is by reviewing the legislation, legal theories and jurisprudence related to the issues discussed. The data used are secondary data, namely: data that support information or support the completeness of primeir data obtained from libraries and collections of personal authors. Data analysis used normative analysis, that collected data poured in the form of logical and systematic description, then in analysis to get clarity of problem solving, then drawn conclusion clearly that is, from general thing to be special thing. The purpose of this study is to know the Judges' Consideration in deciding the case number 532K / PID.SUS / 2016 has been in accordance with Law Number 20 Year 2001 Tetntan Eradication of Corruption. And whether the verdict has reflected a sense of justice and legal certainty.

Counselor:

Herybertus Soekartono, S.H., M.H

Lukman Hakim, S.H., M.H

KATA PENGANTAR

Pendidikan yang tinggi adalah cita-citaku didalam kehidupan ini, karena bagiku dengan pendidikan kita memiliki bekal hidup untuk masa depan. Penantian yang cukup lama membuat penulis begitu bersemangat dan berambisi untuk menerima gelar SARJANA HUKUM, untuk itulah penulis bersyukur kepada pencipta langit dan bumi, pemilik alam jagad raya ini, Tuhan Yang Maha Esa karena penulis dapat menyelesaikan pendidikan guna memperoleh gelar sarjana hukum di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Penulis skripsi ini tentu akan terselesaikan dengan baik tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Karena itu penulis mengucapkan terima kasih kepada :

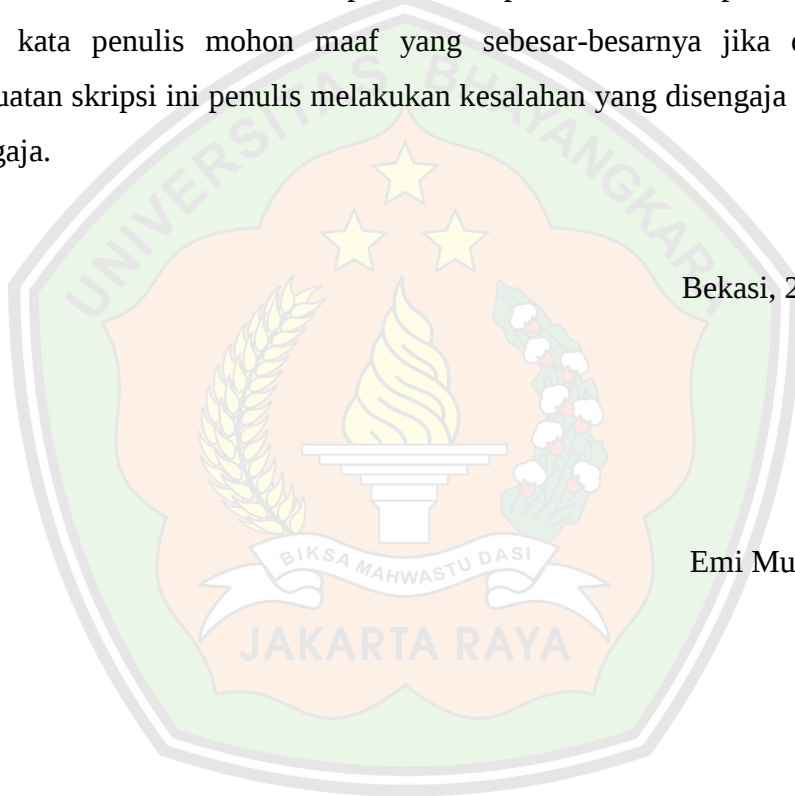
1. Drs. Bambang Karsono, S.H., M.H., selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
2. Dr. Ir. H. Erwin Owan Hermansyah Soetoto, S.E., S.H., M.H., M.M., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
3. Prof. Drs. Koesparmono Irsan, S.H., M.M., M.B.A., selaku Guru Besar Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
4. Herybertus Soekartono, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Pertama yang telah memberikan dan mengorbankan banyak waktunya selama memberikan kontribusi, pemikiran dan bimbingan kepada penulis hingga pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini
5. Lukman Hakim, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Kedua yang telah banyak pula memberikan bimbingan kepada penulis, hingga skripsi ini dapat terselesaikan sesuai kaidah-kaidah ilmiah penelitian hukum
6. Dosen Fakultas Hukum, Staff Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya dan seluruh sivitas akademik yang tidak mungkin penulis sebutkan satu persatu, yang telah berperan terhadap proses pendidikan saya
7. Bapak dan Ibu yang telah membesarkan dan mendidiku dengan budi pekerti

8. Suamiku Yakub Sinaga, yang telah memberikan semangat moril, membantu dan memberikan waktu sepenuhnya untukku
9. Anakku Ruth Pronika Nathania Sinaga “Boru Panggoaranku” yang menjadi penyemangat hidupku
10. Abang dan adikku yang sudah mendukung untuk selalau bersemangat
11. Untuk teman-teman Fakultas Hukum Seperjuangan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya khususnya Reguler sore

Penulis yakin bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, sehingga masukan dan kritik akan selalu penulis harapkan untuk memperbaiki skripsi ini. Akhir kata penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya jika dalam proses pembuatan skripsi ini penulis melakukan kesalahan yang disengaja maupun tidak disengaja.

Bekasi, 26 Juni 2018

Emi Mulyaningsih



DAFTAR ISI

	Halaman
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
LEMBAR PERNYATAAN	v
LEMBAR PERNYATAAN PUBLIKASI	vi
ABSTRAK	vii
ABSTACT	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	x
MOTTO	xi
DAFTAR SINGKATAN	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar belakang.....	1
1.2 Identifikasi dan Rumusan Masalah.....	4
1.2.1 Identifikasi Masalah.....	4
1.2.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	5
1.3.1 Tujuan Penelitian.....	5
1.3.2 Manfaat Penelitian.....	6
1.4 Kerangka Teori, Kerangka Konseptual, Kerangka Pemikiran.....	6
1.4.1 Kerangka Teori.....	6
1.4.2 Kerangka Konseptual.....	10

1.4.3 Kerangka Pemikiran.....	12
1.5 Metode Penelitian.....	13
1.5.1 Jenis Penelitian.....	13
1.5.2 Sumber dan Jenis Data.....	14
1.5.3 Analisa Data.....	14
1.6 Sistematika Penulisan.....	15

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Teori Pidana	17
2.1.1 Teori Pidana Pasal 54.....	19
2.1.2 Jenis-Jenis Pidana.....	20
2.1.3 Jenis Pidana Korupsi	21
2.1.4 Pencabutan Hak-Hak	22
2.2 Teori Penerapan dan Kepastian Hukum.....	23
2.3 Teori Keadilan Hukum	26
2.4 Penerapan Tindak Pidana Korupsi.....	28
2.5 Ruang Lingkup Tindak Pidana Korupsi.....	29
2.6 Sistematika Tindak Pidana Korupsi.....	29
2.7 Tindak Pidana Korupsi diatur Secara Khusus	30
2.8 Pengertian Pencabutan Hak Politik	30
2.9 Pengertian Penyelenggara Negara	31
2.10 Pengertian Korupsi, Kolusi, Nepotisme.....	33
2.11 Pengertian Gratifikasi	33
2.12 Pengertian Penyalahgunaan Kewenangan.....	34
2.13 Pengertian Penanganan dan Pidana Tipikor.....	35
2.14 Pengertian Pencegahan Tipikor	36
2.15 Sanksi Hukum Tipikor	37

2.15.1 Hukum Pidana	38
2.15.2 Sanksi Administrasi	39

BAB III : HASIL PENELITIAN

3.1 Penerapan hukum tindak pidana korupsi.....	48
3.1.1 Dakwaan Penuntut Umum	52
3.1.2 Dalam Persidangan Majelis Hakim	52
3.1.3 Dalam persidangan dihadirkan Saksi-Saksi	52
3.1.4 Dalam persidangan membuat Nota Pembelaan Terdakwa.....	53
3.1.5 Amar Putusan Hakim.....	53
3.1.6 Pertimbangan Majelis Hakim.....	54
3.1.7 Putusan Majelis Hakim.....	59

BAB IV : PEMBAHASAN

4.1 Penerapan Hukum Pidana Korupsi Berupa Pencabutan Hak Politik Berdasarkan Pasal 18d Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.....	64
4.2 Putusan Nomor 532K/PID.SUS/2016 Belum mencerminkan Rasa Keadilan dan Kepastian Hukum Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.....	75

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan.....	83
B. Saran.....	84

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT PENULIS

MOTTO

“ Cobalah untuk tidak menjadi orang sukses,
melainkan menjadi orang yang berharga “

Albert Einstein



DAFTAR SINGKATAN

DPR = DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

DPRD = DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

MPR = MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT

KKN = KORUPSI, KOLUSI, NEPOTISME

KPK = KOMISI PEMBERANTAS KORUPSI



DAFTAR LAMPIRAN

LEMBAR KONSULTASI PEMBIMBING

PUTUSAN MA NOMO 532K/PID.SUS/2016

DAFTAR RIWAYAT PENULIS

